

Enhancing the Role of Religious Education in Countering Violent Extremism in Indonesia – **CONVEY Indonesia**

Policy Brief Series

Issue 11 | Vol. 1 | 2018

Policy Brief series ini dibuat sebagai bagian dari proyek CONVEY Indonesia yang diselenggarakan oleh PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia, berkolaborasi langsung dengan tujuh lembaga riset.

CONVEY Indonesia dimaksudkan untuk membangun perdamaian di Indonesia dan mencegah ekstremisme bernuansa kekerasan dan radikalisme melalui serangkaian riset-survei, advokasi kebijakan, dan interaksi publik yang berbasis pada potensi pendidikan agama. Proyek CONVEY Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebinekaan, dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda.

Evaluasi Program Ekonomi Sebagai Instrumen Deradikalisasi

Aliansi Indonesia Damai (AIDA)
Indonesia Strategic Policy Institute (ISPI)

Pernyataan Masalah

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak program ekonomi terhadap derajat radikalisme para mantan narapidana teroris (napiter) serta mantan kombatan, baik program ekonomi dari lembaga pemerintah maupun nonpemerintah di Indonesia. Studi ini penting untuk mengevaluasi serta melihat tingkat keberhasilan program intervensi ekonomi sebagai instrumen deradikalisasi melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dari sini diharapkan para pihak terkait dapat mengembangkan program pemberdayaan ekonomi secara lebih tepat dan efisien berdasarkan hasil dan rekomendasi studi ini.

Latar Belakang

Terorisme masih mengancam Indonesia. Berbagai kasus serangan teror atau pun rencana serangan (plot) teror yang digagalkan polisi dalam tiga tahun belakangan ini cukup menjadi bukti. Dari 2015 hingga 2017 ada 40 kasus serangan dan plot serangan terorisme di Indonesia. Selama periode tersebut Densus 88 sudah menangkap 427 orang yang terkait tindak pidana terorisme.¹

Pemerintah menyadari *hard approach strategy* (strategi penanganan) melalui penegakan hukum tak bisa tuntas menghapus terorisme di Indonesia. Pasalnya, penegakan hukum hanya menyelesaikan tindak pidana terorisme tapi tak menuntaskan akar masalah terorisme. *Soft approach strategy* (strategi pencegahan) melalui program deradikalisasi serta kontraradikalisme dipercaya lebih mampu menyelesaikan akar masalah terorisme. Pemerintah percaya bila akar masalahnya diselesaikan maka terorisme di Indonesia bisa terkikis habis.

Deradikalisasi sendiri adalah program intervensi yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah terpapar paham ekstrem seperti napi teroris serta mantan napi teroris. Tujuannya agar orang-

orang itu meninggalkan paham kekerasan yang mereka anut. Sementara kontraradikalisme adalah program intervensi untuk memberikan imunitas terhadap masyarakat umum sehingga tak mudah terpapar paham radikal.

Salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk deradikalisasi adalah melalui program ekonomi. Pendekatan ini dianggap penting karena ada asumsi bahwa salah satu akar masalah terorisme adalah kemiskinan atau masalah ekonomi. *Blue Print Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme* (BNPT) menyebutkan: "Pendekatan ekonomi dalam deradikalisasi adalah salah satu pendekatan yang efektif dalam rangka melakukan pemberdayaan mantan napi teroris dan keluarga. Pemberdayaan ekonomi menciptakan kemandirian dan kesejahteraan mantan napi teroris dan keluarga. Beberapa fakta menunjukkan bahwa faktor kemiskinan menjadi salah satu faktor tumbuh dan berkembangnya radikalisme dan terorisme. Dengan pendekatan ekonomi, pemerintah dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan dapat mengurangi potensi konflik dan aksi radikal terorisme di masyarakat."²

Keyakinan inilah yang kemudian mendorong BNPT dan bekerja sama dengan *civil society organization* (CSO) seperti Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Pusat Riset Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (PRIK UI), Indonesian Muslim Crisis Center (IMC2) dan lain-lain melakukan program deradikalisasi melalui pendekatan ekonomi terutama kepada para eksnapiter.

Mengapa Studi ini Penting?

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan melihat tingkat keberhasilan program intervensi ekonomi sebagai instrumen deradikalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta kuantitatif. Bisa dikatakan inilah

1 Indonesia Strategic Policy Institute (ISPI), *Tabel Rekapitulasi Kasus Serangan dan Plot Serangan Terorisme di Indonesia*, Jakarta, Januari 2018.

2 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), *Blue Print Deradikalisasi*, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Jakarta, 2013.

studi pertama yang menggabungkan sekaligus dua pendekatan. Selama ini studi-studi tentang deradikalisasi di Indonesia dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan tidak secara khusus mengevaluasi pendekatan ekonomi sebagai strategi deradikalisasi.³ Salah satu tujuan penelitian ini adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan yang diharapkan bila dilaksanakan bisa menghasilkan program ekonomi yang lebih efektif sebagai instrumen deradikalisasi.⁴

Metodologi

Penelitian ini adalah studi deskriptif, di mana tujuannya untuk melihat gambaran dampak program intervensi ekonomi. Studi ini menggunakan pendekatan *ex post facto*, di mana data yang menjadi unit analisis (karakteristik responden) sudah ada sebelum penelitian ini dilakukan.

Desain studi eksperimental, di mana ada *control group* atau *comparison group*, dan *treatment group* hanya mungkin dilakukan jika tersedia data kedua grup tersebut, dari lembaga penyelenggara program intervensi, dengan membandingkan variabel yang diukur sebelum menerima program intervensi dan setelahnya antara kedua grup tersebut. Sayangnya, tidak ada pengukuran yang dilakukan oleh para penyelenggara program intervensi. Ada juga lembaga yang tidak bersedia untuk menyerahkan data awalnya, seperti BNPT.

Variabel utama yang diukur dalam penelitian ini adalah dampak ekonomi yang diukur dari pekerjaan dan pendapatan saat ini, serta tingkat radikalisme. Populasi responden penelitian adalah eksnapiter dan atau ekskombatan yang sudah pernah mendapatkan bantuan ekonomi,

3 Beberapa studi tentang deradikalisasi yang terkemuka melalui pendekatan kualitatif misalnya Report Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), berjudul *Countering Violent Extremism in Indonesia: Need for A Rethink*, Januari 2014. Report IPAC lainnya adalah *Update on Indonesian Pro-ISIS Prisoners and Deradicalisation Efforts*, Desember 2016.

4 Kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait deradikalisasi yang tidak berdasarkan basis riset yang memadai dibahas secara terperinci dalam *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*, PUSAD Paramadina, Jakarta, 2017.

baik secara tunai maupun nontunai. Pengertian ekskombatan adalah orang-orang yang pernah terlibat dalam konflik komunal seperti konflik Ambon, Poso bahkan Mindanao Filipina tapi tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme. Pengumpulan dan pengolahan data menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mix method*).

Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner radikalisme sebagai alat ukur terhadap derajat radikalisme responden yang dirumuskan secara independen berdasarkan tantangan-tantangan deradikalisasi di Indonesia. Alat ukur lain sebagai indikator dampak program ekonomi adalah *Subjective Wellbeing Scale*, *Domain Life Satisfaction Scale*, dan pengukuran status ekonomi yang mengadaptasi dari sensus ekonomi.

Temuan

Riset ini dilakukan terhadap 38 orang eksnarapidana kasus terorisme dan ekskombatan yang pernah mendapatkan bantuan program ekonomi di tiga wilayah, yaitu Jabodetabek, Lamongan serta Poso. Perinciannya: 11 orang eksnapiter di Jabodetabek, 17 orang eksnapiter dan ekskombatan di Lamongan, dan 10 eksnapiter serta ekskombatan di Poso. Sementara itu, ada 12 lembaga yang memberikan program ekonomi kepada para partisipan baik lembaga pemerintah seperti BNPT dan Pemkab Poso, maupun CSO seperti YPP, PRIK UI, IMCC dan lain-lain. BNPT sendiri merupakan lembaga terbesar yang memberikan bantuan program ekonomi.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan program ekonomi adalah program bantuan ekonomi tunai dan nontunai. Bantuan ekonomi tunai adalah bantuan dalam bentuk tunai umum (*hard money*) dan tunai khusus (dalam bentuk barang). Sementara itu bantuan ekonomi dalam bentuk nontunai berupa pelatihan ekonomi (baik *hard skill* maupun *soft skill*). Berdasarkan materinya, pelatihan terbagi dua: ada pelatihan ekonomi murni, serta pelatihan campuran di mana materi-materi kewirausahaan

dicampur dengan materi deradikalisasi. Waktu pengumpulan data dari Agustus 2017 hingga November 2017.

Temuan-temuan yang didapat dari studi ini sebagai berikut:

- Tidak ada asesmen awal dan asesmen akhir yang memadai terhadap para partisipan penerima bantuan ekonomi. Asesmen yang dimaksud adalah asesmen derajat radikalisme serta kemampuan ekonomi partisipan. Disebut tidak memadai karena mayoritas lembaga pemberi bantuan tidak melakukan asesmen awal dan akhir. Ada lembaga yang mulai melakukan asesmen awal, tapi tidak melakukan asesmen akhir. Padahal aktivitas ini penting untuk mengukur dampak serta keberhasilan program. Tak hanya itu, asesmen juga penting untuk mengukur risiko, seperti penyalahgunaan bantuan ekonomi. Tahun 2015 di Poso terjadi kasus bantuan ekonomi disalahgunakan untuk mendukung logistik kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Tidak adanya asesmen yang memadai menunjukkan bahwa program intervensi ekonomi sebagai instrumen deradikalisasi tidak dilakukan berbasis pengetahuan yang cukup.
- Tidak ada korelasi antara jumlah pelatihan ekonomi murni atau pun bantuan tunai murni dengan tingkat radikalisme. Dengan kata lain, banyaknya pelatihan yang diberikan atau pun banyaknya bantuan tunai yang diberikan tidak berkaitan dengan naik turunnya derajat radikalisme partisipan.
- Ada korelasi negatif antara jumlah pelatihan ekonomi serta bantuan tunai yang dicampur dengan materi deradikalisasi dengan tingkat radikalisme. Namun, temuan ini belum konklusif karena ada bias responden di mana para partisipan yang menerima program ekonomi baik dari BNPT maupun CSO sudah diseleksi melalui penunjukan langsung terhadap partisipan yang tingkat radikalismenya sudah rendah. Kesimpulan bahwa para partisipan punya tingkat radikalisme rendah bisa dilihat dari fakta bahwa 21 mantan napi teroris yang menerima program adalah mereka yang sudah mengalami *disengagement* atau tingkat radikalismenya rendah. Pada saat berada di lapas mereka adalah narapidana yang kooperatif dan juga mengajukan Pembebasan Bersyarat (PB) yang beberapa syaratnya adalah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bersedia menjadi *justice collaborator*. Begitu juga dengan 17 ekskombatan, mereka adalah orang-orang yang sudah tergabung dengan komunitas eksnapiter yang telah mengalami *disengagement*. Misalnya, ekskombatan di Lamongan adalah para aktivis Lingkar Perdamaian pimpinan Ali Fauzi.
- Penurunan tingkat radikalisme para partisipan terutama eksnapiter merupakan hasil diskusi intensif ketika mereka dipenjara dengan para tokoh kelompok ekstremis yang sudah *disengaged* serta anti terhadap ISIS, contohnya orang seperti Ali Imron. Ditemukan korelasi negatif antara jumlah diskusi dengan Ali Imron dengan tingkat radikalisme. Korelasi ini bisa disimpulkan dua arah: semakin sering berdiskusi dengan Ali Imron, semakin turun tingkat radikalisme. Atau, semakin turun tingkat radikalisme, semakin sering berdiskusi dengan Ali Imron. Penelitian lain yang dilakukan ISPI pada 2015-2016⁵ menguatkan kesimpulan pertama yang menyatakan, banyaknya berdiskusi dengan Ali Imron bisa menurunkan tingkat radikalisme. Dalam riset ISPI terhadap 25 napiiter yang mengalami *disengagement*, mereka mengakui bahwa proses moderasi terjadi setelah diskusi secara intensif dengan Ali Imron ketika mereka ditahan di Polda Metro Jaya. Hal ini juga diperkuat oleh hasil riset IPAC dalam report pada 2014 yang berjudul *Countering Violent Extremism in Indonesia: Need for A Rethink* yang menunjukkan bahwa narapidana teroris yang kooperatif dan mengalami *disengagement* di dalam lapas pada dasarnya mengalami proses *self-disengagement* setelah mengevaluasi aksi-aksi terorisme yang mereka lakukan serta

5 Indonesia Strategic Policy Institute (ISPI), *Penelitian Tentang Tingkat Radikalisme Narapidana Teroris di Indonesia*, 2016.

berdiskusi dengan tokoh-tokoh berpengaruh yang sudah lebih dulu mengalami proses moderasi.

- Meskipun seluruh partisipan sudah mencapai tahap *disengagement* dengan menganggap bahwa aksi terorisme di Indonesia tak lagi *legitimated*, namun ada 65,8% atau 25 orang yang masih potensial kembali melakukan kekerasan dalam kondisi tertentu. Kondisi yang dimaksud adalah bila terjadi konflik komunal seperti kasus Poso dan Ambon di mana orang Islam menjadi korban, mereka bersedia untuk terlibat kembali dalam aksi kekerasan. Dari temuan ini bisa disimpulkan bahwa konflik komunal bisa menjadi pemicu fenomena pemulihan spontan (*spontaneous recovery*), di mana secara tiba-tiba orang kembali kepada perilaku lama yang sudah lama ditinggalkan.
- Tidak ada korelasi antara pelatihan ekonomi dengan persepsi manfaat ekonomi yang didapat dari mengikuti program tersebut. Dengan kata lain, pelatihan-pelatihan ekonomi yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi para partisipan. Hal ini bisa disebabkan karena pelatihan ekonomi tersebut tidak dibuat berdasarkan asesmen kebutuhan para partisipan.
- Ada korelasi positif antara bentuk bantuan tunai dan bantuan barang yang diberikan dengan persepsi manfaat ekonomi yang didapat. Persepsi manfaat ekonomi ini bukan kondisi objektif ekonomi si partisipan, seperti meningkatnya penghasilan ekonomi setelah mendapatkan bantuan tunai. Partisipan menilai bantuan tunai jauh lebih bermanfaat daripada pelatihan ekonomi.
- Mayoritas partisipan belum berhasil menjadikan bantuan tunai dan bantuan tunai khusus berupa barang menjadi modal produktif. Hanya 20% atau 7 orang yang bisa menjadikan bantuan tunai atau bantuan tunai khusus berupa pemberian barang (belanja modal) menjadi modal ekonomi yang produktif. Ketujuh orang tersebut adalah mereka yang sudah memiliki usaha sebelumnya, dan bantuan tunai yang didapat dipergunakan untuk menambah modal.

Pemberian bantuan ekonomi bermanfaat terhadap kegiatan ekonomi partisipan ketika si penerima bantuan sudah memiliki usaha sebelum bantuan diberikan.

- Tidak ada pendampingan dan monitoring dan evaluasi (monev) yang memadai. Sebanyak 55% atau 21 orang mengaku mendapatkan pendampingan dan monev namun pendampingan yang dimaksud oleh mereka adalah pendampingan hanya sampai pada pemberian bantuan tunai atau mendampingi partisipan untuk membeli barang yang akan digunakan sebagai modal (belanja modal). Setelah itu, tidak ada lagi pendampingan atau pun monev terhadap partisipan. Akibatnya, uang tunai yang diterima atau belanja modal kebanyakan tidak menjadi produktif.

Rekomendasi

Kesimpulan dari studi ini: Program ekonomi belum optimal memberikan manfaat ekonomi atau pun menurunkan derajat radikalisme. Namun, studi ini juga menghasilkan temuan-temuan yang bisa menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan program ekonomi sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih optimal, baik manfaat ekonomi maupun manfaat untuk menurunkan derajat radikalisme. Rekomendasi-rekomendasi itu adalah:

- Untuk menghasilkan program ekonomi yang punya dampak menurunkan tingkat radikalisme, penting mencampur intervensi ekonomi dengan kegiatan deradikalisasi atau intervensi ideologi semisal kontranarasi paham kekerasan *Islamic State of Iraq and Syam* (ISIS). Tujuan intervensi ideologi ini adalah untuk menurunkan tingkat radikalisme para partisipan. Sebelum melakukan program intervensi ideologi, penting memahami relasi patron-klien di kalangan calon partisipan. Setelah memahami hal ini, penting untuk mengidentifikasi siapa patron yang paling berpengaruh di kalangan calon partisipan. Patron yang dimaksud adalah patron yang paling otoritatif serta punya pengaruh kuat di kalangan para calon partisipan. Tentu saja patron yang dimaksud di sini adalah patron

yang sudah mengalami *disengagement*. Hal inilah yang menjelaskan kenapa Ali Imron punya kemampuan memoderasi banyak napiter, yaitu karena Ali Imron dianggap sebagai patron yang otoritatif serta berpengaruh. Idealnya, intervensi ideologi ini dilakukan sebelum intervensi ekonomi. Salah satu tujuannya agar dana bantuan ekonomi tidak disalahgunakan untuk kegiatan terorisme seperti yang terjadi di Poso pada 2015 di mana seorang penerima bantuan tunai menggunakan uang tersebut untuk membantu kegiatan terorisme. Sementara itu, tujuan dari program ekonomi adalah menjadi insentif bagi partisipan yang mengalami perubahan perilaku ke arah lebih positif, yang ditandai dengan menurunnya derajat radikalisme. Agar perubahan positif berlangsung secara berkelanjutan, besaran bantuan ekonomi harus diberikan berdasarkan derajat radikalisme. Semakin rendah tingkat radikalisme, semakin besar bantuan ekonomi yang diberikan. Tujuannya agar memotivasi para partisipan untuk terus menurunkan derajat radikalismenya.

- Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap konflik komunal, seperti konflik SARA di Ambon dan Poso. Pasalnya, konflik komunal seperti itu merupakan faktor pemicu *spontaneous recovery* di mana para partisipan yang sudah mengalami *disengagement* tiba-tiba terlibat lagi dalam kekerasan.
- Untuk menghasilkan sebuah program ekonomi yang membuahakan manfaat ekonomi dan menurunkan tingkat radikalisme secara maksimal, diperlukan tiga tahap program kegiatan:
 1. Pra intervensi berupa asesmen atau *baseline study* terhadap calon partisipan. Dalam kegiatan pra intervensi ini dilakukan asesmen terhadap para calon partisipan, dimulai dari asesmen tingkat radikalisme melalui instrumen pengukuran radikalisme, asesmen kondisi ekonomi melalui instrumen ekonomi, serta kompetensi kewirausahaan calon partisipan. Mengukur kompetensi calon partisipan

tujuannya untuk mengetahui kapasitas yang bersangkutan dalam berwirausaha. Sekiranya tak punya kapasitas sebaiknya langsung diarahkan untuk jadi pekerja. Sementara itu, bila punya kompetensi maka perlu diidentifikasi bidang wirausaha apa yang diminati serta kemampuan apa yang sudah dimiliki. Hasil asesmen ini bermanfaat untuk menentukan jenis intervensi seperti apa yang tepat dilakukan terhadap si calon partisipan. *Baseline study* ini penting bukan hanya untuk mengidentifikasi jenis intervensi yang tepat tapi juga datanya akan membantu proses monitoring serta evaluasi keberhasilan program intervensi ekonomi yang akan dilakukan.

2. Intervensi. Program ini dimulai dengan intervensi ideologi dalam rangka menurunkan tingkat radikalisme para partisipan. Selepas program intervensi barulah dilakukan asesmen ulang terhadap derajat radikalisme sekaligus untuk menentukan besaran bantuan ekonomi yang akan diberikan. Pengukuran derajat radikalisme yang kedua ini hasilnya dibandingkan dengan hasil asesmen awal soal tingkat radikalisme. Hal ini dilakukan sekaligus untuk mengevaluasi dampak kegiatan intervensi ideologi. Tahap selanjutnya, diberikan pelatihan kewirausahaan serta bantuan tunai langsung atau pun bantuan tunai khusus berupa barang. Selama masa pelatihan kewirausahaan, materi intervensi ideologi tetap harus diberikan untuk memastikan pelatihan ini punya dampak menurunkan tingkat radikalisme.
3. Pendampingan usaha serta monitoring dan evaluasi. Mentoring atau pendampingan usaha menjadi penting bagi partisipan, terutama membantu mereka dalam menghadapi dan menemukan solusi atas masalah-masalah di lapangan. Dalam banyak kasus, kegagalan pemberian bantuan tunai atau belanja modal tidak bisa

menjadi produktif disebabkan karena partisipan kesulitan menghadapi berbagai masalah hingga akhirnya menyerah di tengah jalan. Selama proses pendampingan, kegiatan intervensi ideologi tetap harus dilakukan untuk terus menurunkan derajat radikalisme partisipan. Kegiatan pendampingan dan monitoring ini diakhiri dengan evaluasi. Kegiatan evaluasi meliputi evaluasi keberhasilan intervensi ekonomi serta intervensi ideologi melalui instrumen ekonomi dan instrumen untuk mengukur derajat radikalisme. Hasil akhir ini akan dibandingkan dengan *baseline study* soal kemampuan ekonomi dan derajat radikalisme partisipan.

- Dalam proses pendampingan ini juga penting untuk membangun koneksi antara para partisipan dengan lembaga-lembaga ekonomi lokal. Koneksi ini bukan hanya saja penting memudahkan monitoring serta membantu kesulitan para partisipan ketika menjalankan usaha, tetapi juga akan bermanfaat untuk proses reintegrasi sosial para partisipan dengan masyarakat tempatan.



Enhancing the Role of Religious Education in Countering Violent Extremism in Indonesia

Gedung PPIM UIN Jakarta,
Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: pmu.convey@gmail.com | Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:



Empowered lives.
Resilient nations.